

# UPAYA PENGURANGAN ANGKA PUTUS SEKOLAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH WALINAGARI DI KENAGARIAN TABEK PANJANG KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

Windi Puan Maharani  
NPP. 30.0219

*Asdaf Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat*  
*Prodi Politik Indonesia Terapan*  
Email: 30.0219@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing: Dr. Muhadam Labolo, M.Si

## ABSTRACK

**Problem Statement/Background (GAP):** The problem of dropping out of school for children with disabilities is often seen in Tabek Panjang District, Baso District, Agam Regency. Various factors that cause children with disabilities to drop out of school are separate tasks for the government, schools and families / communities to overcome this. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the activities and steps pursued by Walinagari to reduce the number of children with special needs who drop out of school and provide an explanation of the obstacles and supports that encourage and hinder the implementation of the activities pursued by Walinagari. **Method:** By using descriptive qualitative methods with Case Study research strategies or often referred to as CSR (Case Study Research). And the theory used is the theory of Suyanto and Dian Savitri, namely by conducting early intervention in the form of handling problematic children from an early age, utilizing support from the community and local government. **Results:** The Kenagarian government has tried to reduce the dropout rate by introducing the community through socialization communication in the form of art performances, helping such as package schools and assistance in the form of funds from Nagari treasury, and the obstacles are the lack of knowledge about the importance of inclusive education and the family and community environment that has not been open to existing differences. **Conclusion:** The cause of children with disabilities not getting inclusive education is due to ineffective parenting due to lack of knowledge about parenting, especially children with special disabilities or disabilities, as well as communities that are not open to existing differences, and other things happen due to inadequate economic factors considering that inclusive education in Kenagarian Tabek Panjang is a private school that requires costs in its teaching system.

**Keywords:** Education, Inclusive, Walinagari.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Angka Permasalahan putus sekolah bagi anak disabilitas kerap terlihat di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Berbagai faktor yang menjadi penyebab anak disabilitas putus sekolah menjadi tugas tersendiri bagi pemerintah, pihak sekolah dan keluarga/masyarakat untuk menanggulangi hal tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kegiatan dan langkah-langkah yang diupayakan oleh Walinagari untuk mengurangi jumlah anak berkebutuhan khusus yang putus sekolah serta memberi penjelasan mengenai hambatan dan dukungan yang mendorong dan menghambat terlaksananya kegiatan yang diupayakan oleh Walinagari. **Metode:** Dengan menggunakan metode kualitatif deksriptif dengan strategi penelitian Studi Kasus atau sering disebut dengan CSR (Case Study Research). Dan teori yang digunakan merupakan teori dari Suyanto dan Dian Savitri yakni dengan melakukan intervensi dini berupa penanganan anak

yang bermasalah sedari dini, memanfaatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat. **Hasil/Temuan:** pemerintah kenagarian telah berupaya mengurangi angka putus sekolah dengan cara pengenalan terhadap masyarakat melalui komunikasi sosialisasi berupa pentas seni, memberikan bantuan seperti sekolah paket dan bantuan berupa dana dari kas Nagari, dan yang menjadi hambatan adalah kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan inklusif serta lingkungan keluarga dan masyarakat yang belum terbuka terhadap perbedaan yang ada. **Kesimpulan:** Penyebab anak penyandang disabilitas tidak mendapatkan pendidikan inklusif dikarenakan oleh pola asuh orangtua yang tidak efektif karena minimnya pengetahuan mengenai pola asuh anak apalagi anak dengan keterbatasan khusus atau disabilitas, begitu juga dengan masyarakat yang tidak terbuka atas perbedaan yang ada, dan hal lain terjadi karena faktor ekonomi yang kurang memadai mengingat pendidikan inklusif yang ada di Kenagarian Tabek Panjang merupakan sekolah swasta yang memerlukan biaya dalam sistem pengajarannya.

**Kata Kunci :** Pendidikan, Inklusif, Walinagari.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyandang disabilitas memerlukan bantuan atas kekurangan yang dimiliki. Tapi bukan berarti penyandang disabilitas tidak mampu untuk menjalani siklus, hanya saja adanya keterbatasan yang membuat penyandang disabilitas memerlukan orang lain untuk ikut andil dalam siklus kehidupannya. justru dengan adanya penyandang disabilitas memberikan pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial dan masyarakat. Bagi penyandang disabilitas pendidikan itu terpusat pada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan terhadap peserta didik yang berkelainan serta memiliki bakat istimewa untuk ikut dalam melaksanakan pendidikan atau pembelajaran di satu lingkup pendidikan secara Bersama dengan peserta didik pada umumnya (Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2009).

Dalam filosofisnya pendidikan adalah bagian dari Hak Azasi Manusia yang sejalan dengan UUD 1945. Sesungguhnya pendidikan itu sifatnya terbuka, tidak diskriminatif dan dapat dijangkau oleh semua orang tanpa pengecualian. Terhadap anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, atau motorik tetap dikategorikan dalam warga negara yang berhak untuk menerima pendidikan selayaknya warga negara lainnya, maka perealisasi pendidikan bagi mereka juga harus dilakukan “ Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum mampu untuk mengakomodasi keberagaman yang ada di tiap siswa. Segmentasi ini menyebabkan para siswa terhambat, untuk menghormati realita bahwa adanya keberagaman dalam suatu masyarakat. Selama ini banyak anak berkebutuhan khusus yang berbaur dengan anak normal pada umumnya, sehingga interaksi anak berkebutuhan di masyarakat umum menjadi tersingkirkan dalam dinamika sosial masyarakat (Pratiningrum, 2010).

Di Indonesia kisaran anak berkebutuhan khusus dengan rentang usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Dengan jumlah penduduk di usia tersebut berjumlah 66.6 juta jiwa, jadi disimpulkan jumlah anak disabilitas dengan rentang usia 5-19 tahun adalah berkisar 2.197.883 jiwa. Anak disabilitas yang mengikuti Pendidikan inklusi adalah 269.398 anak. Jadi persentase anak disabilitas yang menempuh Pendidikan adalah 12.26% dari jumlah keseluruhan. Jadi angka putus sekolah bagi anak disabilitas di Indonesia masih sangat memprihatinkan.

Secara garis besar penyebab banyaknya anak disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan di ruang sekolah diantaranya: pertama, bagi orangtua karena keterbatasan biaya melengkapi kebutuhan. Kedua, orangtua yang kurang berpengetahuan serta buta terhadap kekurangan anak yang menyebabkan rasa malu, atas pandangan masyarakat untuk

menyekolahkan anak di sekolah luar biasa / sekolah pendidikan khusus. Ketiga tidak ada Gerakan dari pemerintah untuk memperhatikan kenapa banyak anak disabilitas yang putus sekolah, dan yang Keempat anak kerap mendapat tekanan mental dari lingkungan dan teman sebaya atas kekurangannya, yang menyebabkan apabila ia bersekolah di sekolah pendidikan inklusif dapat memperberat tekanan yang dirasakan(Kaufman & Whitener, 1996)

Angka Permasalahan putus sekolah bagi anak disabilitas kerap terlihat di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Berbagai faktor yang menjadi penyebab anak disabilitas putus sekolah menjadi tugas tersendiri bagi pemerintah, pihak sekolah dan keluarga/masyarakat untuk menanggulangi hal tersebut. Setiap keputusan dan langkah dalam kehidupan ini tidak terlepas dari aspek gejala pemerintahan, maka di aspek kehidupan dibutuhkan yang namanya hubungan timbal balik atas pemenuhan hak dan kewajiban dari pemerintah dan warga negara. Pemerintah memberikan layanan demi pemenuhan hak dan warga negara taat peraturan demi memenuhi kewajiban sebagai warga negara(Labolo, 2014).

Atas dasar diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Upaya Pengurangan Angka Putus Sekolah Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Wali Nagari Di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.**

## **1.2 Kesenjangan Masalah**

Secara garis besar penyebab banyaknya anak disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan di ruang sekolah diantaranya: pertama, bagi orangtua karena keterbatasan biaya melengkapi kebutuhan. Kedua, orangtua yang kurang berpengetahuan serta buta terhadap kekurangan anak yang menyebabkan rasa malu, atas pandangan masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah luar biasa / sekolah pendidikan khusus. Ketiga tidak ada Gerakan dari pemerintah untuk memperhatikan kenapa banyak anak disabilitas yang putus sekolah, dan yang Keempat anak kerap mendapat tekanan mental dari lingkungan dan teman sebaya atas kekurangannya, yang menyebabkan apabila ia bersekolah di sekolah pendidikan inklusif dapat memperberat tekanan yang dirasakan.

Angka Permasalahan putus sekolah bagi anak disabilitas kerap terlihat di Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Berbagai faktor yang menjadi penyebab anak disabilitas putus sekolah menjadi tugas tersendiri bagi pemerintah, pihak sekolah dan keluarga/masyarakat untuk menanggulangi hal tersebut. Setiap keputusan dan langkah dalam kehidupan ini tidak terlepas dari aspek gejala pemerintahan, maka di aspek kehidupan dibutuhkan yang namanya hubungan timbal balik atas pemenuhan hak dan kewajiban dari pemerintah dan warga negara. Pemerintah memberikan layanan demi pemenuhan hak dan warga negara taat peraturan demi memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Profil Anak Putus Sekolah di Nagari Sungai Patai Sungayang Kabupaten Tanah Datar (Desviana, 2020) dengan hasil penelitian menjelaskan bagaimana latar belakang keluarga dan faktor yang menyebabkan anak putus sekolah.

Kedua, Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Menekan Angka Putus Sekekolah Di Desa Batulapa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone(Syam & Ramlawati, n.d.) dengan hasil Menjelaskan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mengurangi angka Putus Sekolah.

Ketiga, Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru(Wusqo, 2021) dengan hasil penelitian ini menjelaskan bentuk dan upaya pembinaan terhadap penyandang disabilitas.

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya, penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, Penelitian ini berfokus pada latar belakang anak putus sekolah sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada pengawasan pemerintah desa terhadap anak putus sekolah.

Kedua, Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan organisasi untuk mengurangi angka putus sekolah sedangkan penelitian saat ini membutuhkan aspek pemerintah yang lebih luas lagi.

Ketiga, Penelitian ini berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas sedangkan penelitian saat ini menitikberatkan kepada persamaan hak atas Pendidikan bagi penyandang Disabilitas.

## 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Walinagari sebagai bagian dari sistem ke pemerintahan kenegerian dalam mengurangi angka putus sekolah kelompok disabilitas di Kengerian Tabek Panjang, Mendapatkan informasi mengenai apa saja faktor yang menghambat dan mendukung Walinagari dalam upaya pengurangan angka putus sekolah, Mendapatkan informasi atas alasan mengapa kelompok disabilitas belum mendapat pendidikan inklusif.

## II. METODE

Penulis menerapkan penelitian kualitatif. Penelitian sifat kualitatif memiliki tujuan utama agar suatu fenomena atau gejala yang terjadi dapat didapati informasi yang objektif dengan dasar gambaran yang lengkap (Rahardjo & Gudnanto, 2011). Penulis menggunakan Teori Upaya pengurangan angka putus sekolah.

Informan pada penelitian ini terdapat 7 informan. Teknik pengambilan informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu *Purposive sampling*. *purposive sampling* adalah sebuah metode pengumpulan sampel yang memiliki tujuan khusus, pengumpulan data ini tidak bersifat random melainkan memiliki tujuan (purpose) yang berfokus pada penelitian yang sedang dijalankan (Arikunto, 2006). Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik dalam pengumpulan data kualitatif terdiri dari: (1) Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur; (2) penelitian lapangan langsung; (3) dokumen (Patton, 2012). Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman (1984) yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Upaya Wali Nagari dalam Penanggulangan Angka Putus Sekolah bagi Kelompok Penyandang Disabilitas

#### a. Wali Nagari Sebagai Motivator

Peranan dari Wali Nagari untuk menangani angka putus sekolah bagi penyandang disabilitas akan menjadi hal yang sangat penting dalam memajukan taraf dan kualitas masyarakat di kenagarian Tabek Panjang. Dengan melihat hal-hal dan faktor yang menjadi penyebab mengapa anak disabilitas berada dikategori putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang layak, bukan hanya lingkup keluarga dan lingkungan saja namun mutlak diperlukan campur tangan aktif pemerintah setempat dalam mengatasi permasalahan ini, sehingga angka putus sekolah dapat dikurangi dari waktu ke waktu. Peranan dan hadirnya seorang Wali Nagari sebagai pimpinan sebuah Kenagarian, bantuan dan hadirnya sangat dibutuhkan untuk memberikan segala sesuatu yang dapat membantu dan menjanjikan

terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dalam bidang pendidikan. Upaya yang dilakukan yakni dengan memerankan perannya sebagai motivator.

**i. Wali Nagari Sebagai Motivator**

Kegiatan atas upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kenagarian terhadap masyarakat atas dasar upaya mengurangi angka putus sekolah bagi penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus menghasilkan, masyarakat dengan pemikiran terbuka dan anak-anak yang pede dengan apa yang dimiliki, dalam artian semua manusia merupakan insan tuhan yang sempurna dengan kekurangan dan kelebihan yang indah dan pastinya tidak semua orang memiliki keindahan tersebut, dengan upaya yang dilakukan diharapkan mampu untuk menghasilkan kualitas Pendidikan yang lebih baik terselenggara di Kenagarian Tabek Panjang.

**ii. Intervensi Dini Terhadap Anak yang bermasalah**

Intervensi dini merupakan peringatan atau pecegahan yang dilakukan sedari kecil yang bertujuan untuk meminimalkan dampak dimasa yang akan datang. Intervensi yang dilakukan oleh Walinagari serta tenaga pendidikan dalam menyelenggarakan target acuan ini, yaitu dengan sosialisasi dari tenaga pendidik, serta medis terhadap ibu hamil dan melahirkan. Sebagaimana dari wawancara yang pernah dilakukan dengan Pak Doni sebagai Walinagari yaitu:

Pengetahuan ibu hamil dan menyusui terhadap tumbuh kembang anak sangatlah dibutuhkan, di kenagarian kita, kita selalu menyelenggarakan setidaknya sekali dalam 3 bulan. Penyuluhan terhadap ibu hamil di puskesmas serta penyuluhan disaat kegiatan imunisasi, hal ini dilakukan agar ibu lebih mengetahui lebih jauh tentang anak. Sehingga dengan pengetahuan yang luas sang ibu dapat mengkategorikan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh anak.

**b. Wali Nagari Sebagai Motivator**

Pemerintahan kenagarian menjadi bagian sebagai fasilitator. Fasilitator artinya sebagai penyedia yang melengkapi dan memfasilitasi kekurangan demi tercapainya tujuan yang direncanakan.

**i. Memanfaatkan Dukungan dari Masyarakat dan Pemerintah Setempat**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peranan dan upaya pemerintahan kenagarian dalam penanganan angka putus sekolah diperoleh data bahwasannya pemerintahan kenagarian tabek Panjang telah memberikan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemberian dana dan perlengkapan alat sekolah bagi masyarakat miskin yang didata tidak mampu atau tidak sanggup melanjutkan atau tidak mampu mengikuti sekolah. Tapi kalau untuk penganggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan ke pemerintah Nagari langsung belum ada karena alokasi dana desa belum ada untuk program itu, jadi pemenuhan kebutuhan berasal dari kas desa. Bentuk upaya penanganan anak putus sekolah juga dengan menyuguhkan masyarakat untuk mengikuti Pendidikan dalam bentuk sekolah program paket A,B dan juga C yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Agam. Hal ini dapat menunjang pemenuhan kebutuhan Pendidikan dari anak-anak yang dinyatakan tidak mampu untuk mengikuti Pendidikan sesuai skala umur.

wawancara yang juga pernah dilakukan dengan Ibu Hayatul najmi S.Pd mengenai bantuan yang diberikan kepada siswa yang membutuhkan pertolongan dalam pemenuhan kebutuhan sekolah dan biaya sekolah, berikut isi wawancaranya yaitu:

Perihal bantuan, kebetulan karena sekolah kita sekolah penggerak maka ada yang namanya Bos kinerja yang mana ini merupakan dana bos yang secara sengaja dialokasikan untuk siswa yang membutuhkan, dan syukurnya sampai sekarang dana bos kinerja itu masih sering masuk hingga sekarang.

Wawancara tersebut menuturkan dan memberi penerangan bahwasannya pergerakan dari pemerintah dalam memahami dan mengalokasikan dana sudah cukup lebih baik untuk memajukan pendidikan, bantuan berupa dana sudah dikerahkan oleh pemerintah pusat dan pemenuhan kebutuhan sekolah juga sudah diselenggarakan oleh pemerintah Kenagarian Tabek Panjang. Dengan itu maka angka dan penanganan untuk anak disabilitas yang beralasan biaya dapat untuk ditekan lagi.

### **3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Berkurangnya Angka Putus Sekolah di Kenagarian Tabek Panjang**

Hal-hal yang menjadi hambatan dan dukungan bagi pemerintah daerah khususnya lingkup Kenagarian Tabek Panjang dalam mengurangi angka putus sekolah bagi penyandang disabilitas antara lain adalah:

#### **1. Faktor Pendukung**

- a. Adanya Dorongan Dari Sekolah Untuk Menggagas Mengenai Pengenalan Sekolah Luar Biasa (SLB) Terhadap Orang Luar. Sekolah yang aktif juga akan menuntut pemerintah untuk peka dan paham akan maksud atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, seperti pada kegiatan penggelaraan pentas seni atau Artshow yang diselenggarakan di Kenagarian Tabek Panjang merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif dan dukungan pemerintah Kenagarian sebagai fasilitator dan Sekolah sebagai pendukung dari penyelenggaraan acara, dengan maksud agar sekolah dapat dikenal lebih luas dan membuka fikiran masyarakat mengenai anak disabilitas.
- b. Walinagari Yang Didengar oleh Masyarakat Berhubung dengan pemerintahan Kenagarian yang diselenggarakan di daerah Sumatera Barat merupakan Wali Nagari yang dipilih oleh masyarakat yang mana pemilihan dilakukan dengan melihat bagaimana latar belakang adat dan budaya hingga akhirnya ia mendapat jabatan sebagai pemerintah Nagari mengartikan bahwasannya Walinagari merupakan orang yang didengar dan diikuti perkataan dan perintahnya karena ia adalah orang yang dipercaya baik secara dasar adat budaya ataupun politik. Dengan pemimpin yang dipercaya atas tanggung jawab dan hasil kerjanya kelak manghasilkan gagasan dan pemikiran dari Walinagari lebih mudah untuk direalisasikan.
- c. Kerjasama pihak sekolah umum dengan sekolah luar biasa dan Pemerintah Nagari. Kerjasama yang dilakukan antara pihak Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan sekolah umum dengan bantuan komunikasi sosialisasi dari pemerintahan Kenagarian terhadap pegawai sekolah umum menghasilkan intisari yang isinya adalah sekolah umum yang mendapati anak muridnya merupakan anak disabilitas atau berkebutuhan khusus akan memberikan saran dan anjuran terhadap orang tua murid yang bersangkutan, pihak guru akan menjelaskan sebisa mungkin untuk mengarahkan pemindahan anak untuk bersekolah di Sekolah Luar Biasa, dan sekolah Luar Biasa akan menerima surat rekomendasi anak yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah di SLB yang jelas sesuai dengan tupoksi anak. Tugas Walinagari disini adalah menyelenggarakan dan memberi peringatan kepada pihak sekolah umum untuk berlaku adil dan tidak ada penggelapan nama murid,hal ini dilakukan dengan sosialisasi atau komunikasi antara Walinagari dengan kepala sekolah SLB Baso dengan pihak sekolah umum.

#### **2. Faktor Penghambat**

- a. Kesulitan dalam menyelidiki atau menemui orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dalam pengenalan program Pendidikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus tentunya berasal dari inisiatif orangtua untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mencari tau dimana tempat yang pas dan cocok untuk mengenalkan anak dengan lingkungan yang mampu untuk mendukung tumbuh kembangnya sesuai dan

layak dimasa depan nanti, namun pada kasusnya orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus cenderung sulit untuk ditemui dengan alasan keberadaannya dan kekurangan yang dimiliki anaknya tidak terdeteksi oleh masyarakat setempat berhubung bahwasanna anak tersebut tidak memiliki kelainan secara fisik namun memiliki kekirangan yang tidak dapat dilihat langsung sehingga sulit untuk ditemui, hal ini berlaku untuk anak penyandang kecurahan seperti Hiperaktif, Tunda Daksa Dan lain sebagainya. Dengan keterangan tersebut menjadikan poin ini menjadi salah satu penghambat yang sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintah kenagarian dalam mengurangi angka putus sekolah bagi penyandang disabilitas.

- b. Faktor Lingkungan Faktor lingkungan merupakan fakta yang sangat krusial dalam artian bahwasannya lingkungan menjadi alasan utama yang dapat mendorong dan bahkan dapat menyulitkan perkembangan pola pikir baik dari orangtua hingga pada anak itu sendiri, seperti yang diketahui bahwa di kenagarian ini banyak yang masih belum paham dan mengerti mengenai pentingnya Pendidikan inklusif hal ini menjadi tantangan tersendiri atau menjadi hambatan tersendiri dalam proses pengenalan terhadap masyarakat dan hingga pada orangtua, karena dampak dari lingkungan itu sendiri sangatlah berpengaruh.

### **3.3 Penyandang Disabilitas dan Pendidikan Inklusif**

berikut rangkuman penyebab anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas belum mendapatkan pendidikan inklusif yang mumpuni yaitu:

#### **1. Peran Orangtua**

wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah SLB Baso yang menyebutkan bahwasanya:

Masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan Pendidikan yang semestinya, hal ini terjadi karena masyarakat yang masih awam dan masih memiliki spekulasi negatif terhadap anak berkebutuhan khusus, orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (hiperaktif, kesulitan belajar) lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah umum yang berdampak pada ketidakmampuan anak untuk mengikuti kurikulum. Pendidikan sehingga anak tinggal kelas bertahun-tahun (Sumber: wawancara 19 Januari, 2023).

Keluarga merupakan lembaga pembelajaran utama yang paling penting dalam kehidupan anak, dengan peranan dan kehadiran sosok orangtua yang mengerti akan kebutuhan anak maka akan menghasilkan anak yang memiliki moral dan nilai dibanding anak yang tidak mendapat perhatian yang dalam dari orangtua.

Peranan orangtua yang tidak peka dan tidak peduli akan kebutuhan yang selayaknya dan sepatutnya dipenuhi demi mencapai pemenuhan kebutuhan dasar mengenai Pendidikan. Oleh karenanya peran serta pengetahuan orang tua mengenai anak perlu peningkatan dan diperbaiki yang selaras juga dengan bentuk pola pikir (mindset) yang beranggapan sekolah difabel adalah sekolah cacat.

#### **2. Masyarakat Yang Tidak Mendukung**

wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2023 kepala sekolah SLB Baso menjelaskan bahwa:

Sejak keberadaannya di tahun 2012 dibawah naungan Yayasan jembatan hati menunjukkan bahwasannya sekolah ini sudah lama berkembang dan berdirinya yang sudah lama, namun dalam pengenalan terhadap masyarakat di kategori lingkup Kenagarian tabek Panjang dan sekitarnya terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang

belum mengerti mengenai maksud keberadaan dari Sekolah Luar Biasa, mereka beranggapan bahwa hadirnya sekolah ini merupakan sekolah yang ditujukan kepada orang yang cacat (dokumentasi Wawancara 19 Januari 2023).

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan ini dapat dilihat bahwasannya masyarakat masih banyak yang memiliki pemikiran tertutup dan tidak mengerti betul maksud dari kehadiran sekolah berkebutuhan khusus, sehingga dengan itu juga menghasilkan buah pikir bahwasanya Sekolah Luar Biasa merupakan sekolah yang ditujukan untuk anak yang cacat. Dengan itu dapat diambil kesimpulan bahwa peranan masyarakat tergolong rendah dan bahkan jatuh kepada berusaha untuk menutupi kekurangan anak atau juga menjurus pada konsep anak memiliki kebutuhan khusus adalah aib, hal ini menyebabkan 68 banyaknya orangtua dan masyarakat enggan menyekolahkan anak yang berkebutuhan khusus di sekolah yang semestinya.

### **3. Faktor Ekonomi Yang Kurang Memadai**

wawancara dari kepala sekolah SLB Baso yakni ibu Hayatul Najmi S.Pd pada 19 Januari 2023 yang menerangkan bahwa:

Faktor lain yang menjadi salah satu alasan mengurungkan niat untuk menyekolahkan anak di lingkup Sekolah Luar Biasa adalah faktor jarak dan ekonomi yang dibawah rata-rata, sehingga dengan kekurangan yang ada menyebabkan anak berhenti sekolah (hasil wawancara 19 Januari 2023).

Masalah keuangan atau perekonomian merupakan hal yang paling sering dijumpai mengapa seseorang dapat mengurungkan niat akan sesuatu yang ingin untuk dicapai. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diambil kesimpulan bahwa faktor ekonomi menjadi suatu poin yang menjadi alasan yang mengharuskan anak untuk tidak melanjutkan Pendidikan, menyekolahkan anak di sekolah yang tidak sesuai dengan tupoksi dan bahkan mengharuskan anak disabilitas untuk putus sekolah.

### **4. Jarak**

wawancara dijelaskan oleh Ibu Hayatul Najmi, S.Pd menerangkan bahwa:

Tidak banyak juga yang beralasan bahwa jarak menjadi salah satu alasan anak sering bolos atau tidak masuk sekolah karena keterbatasan mengenai siapa yang akan mengantar anak dan siapa yang akan menjemput ketika di waktu pulang sekolah, karena yang bersekolah disini bukan Cuma anak kenagarian kita tapi juga dari kenagarian lain (dokumentasi wawancara 19 Januari 2023).

Dengan alasan jarak dan efektivitas waktu orangtua menjadi penyebab atau alasan lain orangtua untuk tidak menyekolahkan atau tidak mengantar anak untuk menimba ilmu pengetahuan di sekolah. Hal ini menjadi faktor yang cukup memprihatinkan mengenai kepekaan dan ambisi orangtua yang rendah mengenai kebutuhan anak yang hendaknya dan semestinya terpenuhi demi memenuhi kebutuhan hak azazi yang sangat mendasar bagi anak.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian (Desviana, 2020) dengan hasil penelitian menjelaskan bagaimana latar belakang keluarga dan faktor yang menyebabkan anak putus sekolah. Terletak pada penyandang disabilitas putus sekolah adalah mengadakan kegiatan pengenalan Sekolah Luar Biasa (SLB) terhadap orang luar untuk menaikkan pamor dari Sekolah Luar Biasa (SLB), dan kerjasama antara pihak sekolah umum dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam hal penyaringan murid yang dikategorikan sebagai murid disabilitas agar dialokasikan ke sekolah inklusif.



Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian (Syam & Ramlawati, n.d.) terletak pada Penyebab anak penyandang disabilitas tidak mendapatkan pendidikan inklusif dikarenakan oleh pola asuh orangtua yang tidak efektif karena minimnya pengetahuan mengenai pola asuh anak apalagi anak dengan keterbatasan khusus atau disabilitas, begitu juga dengan masyarakat yang tidak terbuka atas perbedaan yang ada, dan hal lain terjadi karena faktor ekonomi yang kurang memadai mengingat pendidikan inklusif yang ada di Kenagarian Tabek Panjang merupakan sekolah swasta yang memerlukan biaya dalam sistem pengajarannya

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru (Wusqo, 2021) terletak pada Walinagari berperan menjadi sosok pemimpin yang mengayomi yaitu dengan bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Motivator dalam artian penyampaian motivasi positif seperti pentas seni yang diisi oleh anak disabilitas, pengenalan anak berkebutuhan khusus terhadap khalayak ramai. Fasilitator dalam artian penyelenggaraan kegiatan positif seperti pemberian bantuan dari dana kas desa untuk memenuhi kebutuhan sekolah dari anak penyandang disabilitas yang membutuhkan, serta pengenalan sekolah paket A, B dan C terhadap masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

Penyebab anak penyandang disabilitas tidak mendapatkan pendidikan inklusif dikarenakan oleh pola asuh orangtua yang tidak efektif karena minimnya pengetahuan mengenai pola asuh anak apalagi anak dengan keterbatasan khusus atau disabilitas, begitu juga dengan masyarakat yang tidak terbuka atas perbedaan yang ada, dan hal lain terjadi karena faktor ekonomi yang kurang memadai mengingat pendidikan inklusif yang ada di Kenagarian Tabek Panjang merupakan sekolah swasta yang memerlukan biaya dalam sistem pengajarannya.

1. Faktor penghambat dan pendukung upaya pengurangan angka penyandang disabilitas putus sekolah adalah mengadakan kegiatan pengenalan Sekolah Luar Biasa (SLB) terhadap orang luar untuk menaikkan pamor dari Sekolah Luar Biasa (SLB), dan kerjasama antara pihak sekolah umum dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam hal penyaringan murid yang dikategorikan sebagai murid disabilitas agar dialokasikan ke sekolah inklusif. Faktor yang menjadi hambatan adalah kesulitan dalam menyelidiki atau menemui orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan juga faktor lingkungan di kenagarian ini banyak yang masih belum paham dan mengerti mengenai pentingnya pendidikan inklusif.
2. Walinagari berperan menjadi sosok pemimpin yang mengayomi yaitu dengan bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Motivator dalam artian penyampaian motivasi positif seperti pentas seni yang diisi oleh anak disabilitas, pengenalan anak berkebutuhan khusus terhadap khalayak ramai. Fasilitator dalam artian penyelenggaraan kegiatan positif seperti pemberian bantuan dari dana kas desa untuk memenuhi kebutuhan sekolah dari anak penyandang disabilitas yang membutuhkan, serta pengenalan sekolah paket A, B dan C terhadap masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapakan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Sekolah SLBN 1 Baso dan Wali Nagari Kenagarian Tabek Panjang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Athahirah, A. U. (2022). The Improvement Strategies Of Political Participation For Novice Voters In Purwakarta Regency. *Jurnal Wacana Politik*, 7(1).
- Desviana, R. (2020). *Profil Anak Putus Sekolah di Nagari Sungai Patai Sungayang Kabupaten Tanah Datar*.
- Ismail Shaleh, A. (2021). Efektivitas Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Era COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 02, 1–6.
- Kaufman, M. M., & Whitener. (1996). *Departemen Pendidikan Amerika Serikat*.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). *PERMENDIKNAS NOMOR 07 TAHUN 2009*.
- Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan: suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*.
- Lalolo, L., Perangin-Angin, K., & Zainal, D. M. (2018). *The Prominence Tower, Alam Sutera*. 15.
- Patton. (2012). *Qualitative Research & evaluation Methods*.
- Prasetyo, D., Bantara, U., & Harsan, S. T. (2019). PPKn Study Program Students FKIP. *Civics Education And Social Sciense Journal*, 1(1).
- Pratiningrum, N. (2010). *Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. 7(2).
- Rahardjo, S., & Gudnanto. (2011). *Pemahaman Individu Teknik Non Tes* (N. M. Enterprise (ed.)).
- Saputra, R. (2017). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014*.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syam, A. B., & Ramlawati. (n.d.). *Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Menekan Angka Putus Sekekolah Di Desa Batulapa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*.
- Wusqo, U. (2021). *Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru*.